

ABSTRAK

Aslam Alwan Kadafy 1183060015: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WATES NOMOR 23/PID.B/2022/PN.WAT TENTANG TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI, MEMBUAT, MENYEBARLUASKAN, MENAWARKAN, MEMPERJUAL BELIKAN DAN MENYEDIAKAN PORNOGRAFI SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Kasus yang dialami seseorang yang bernama Fransiska (Siskaee) yaitu mengunggah video bermuatan pornografi ke akun web. *onlyfans.com* miliknya dengan nama *creator onlyfans.com/siskaeee ofc* yang akhirnya menjadi viral pada bulan November 2021 setelah diunggah oleh akun *@koleksiRARE96* di Twitter. Kasus pornografi Fransiska ini seharusnya dikenakan pasal belapis yaitu Pasal yang berkaitan dengan ITE dan Undang-Undang Pornografi, tetapi dalam putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN. WAT sanksi yang diberikan tidak maksimal, tetapi sanksinya hanya 10 bulan. Padahal dalam fakta persidangan yang terungkap Fransiska melanggar pasal berlapis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim, mengetahui sanksi tindak pidana dalam pandangan hukum pidana Islam dan mengetahui relevansi sanksi tindak pidana memproduksi, membuat, menyebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan, dan menyediakan pornografi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dalam hukum pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber dari al-Qur'an, *Hadist*, dan *ijma* yang tidak lepas dari kajian hukum pidana Islam yang berkaitan dengan pembuatan dan penyebaran konten pornografi.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*, yaitu metode yang dilakukan dengan menganalisa suatu dokumen atau data-data yang bersifat normatif yang membahas dan mengatur tentang pornografi kemudian dapat dianalisa lebih lanjut sehingga mendapatkan aturan mengenai sanksi bagi suatu tindak pidana.

Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan pasal dengan fakta-fakta di persidangan yaitu pada dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan telah memenuhi semua unsur-unsurnya dari pasal yang telah didakwakannya. Sanksi tindak pidana pada putusan Nomor 23/Pid B/2022/PN Wat dalam pandangan hukum pidana Islam adalah *jarimah ta'zir*. Sanksi yang diberikand dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam berbeda karena sumber hukumnya berbeda. Relevansinya perbuatan terdakawa sama-sama ada peraturanya yang mengaturnya dan memenuhi unsur tindak pidana ataupun jarimah dan tujuan dari penjatuhan sanksi sama-sama untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.